

**LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

(Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakim yang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

AGUNG PRASTYO WIBOWO

N.I.M: C.100.060.110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) mempunyai ciri khasnya tersendiri, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) pada setiap lembaga negara. Sejalan dengan pemikiran Montesquieu, kekuasaan di dalam sebuah negara dibagi atas tiga fungsi yaitu:¹ (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan (iii) kekuasaan yudikatif untuk menghakimi. Ketiga kekuasaan tersebut harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.²

Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945:³

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Prinsip independensi peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman

¹ C.L. Montesquieu. 1949. *The spirit of Law*. 2nd Edition. New York: Hafner Press

² Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Halaman: 15

³ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan.⁴ Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Perkembangan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik pada dekade ini telah dirumuskan dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada tahun 2001 yang menghasilkan kesepakatan mengenai draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia, kemudian disebut *The Bangalore Draft*.⁶ Draft ini akhirnya diterima oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Di dalamnya termuat enam (6) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi hakim di dunia, yaitu:

(1) Independensi (*Independence Principle*), merupakan prinsip kemandirian dan kemerdekaan bagi hakim baik sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim.

⁴ *Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 2003. Halaman : 1

⁵ Pasal 24 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

⁶ *Op Cit*. Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar...* Halaman: 53

- (2) Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*), prinsip ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama, terkait dengan semua pihak yang terkait dengan perkara.
- (3) Integritas (*Integrity Principle*), aktualisasi dari sikap hakim yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara secara profesional.
- (4) Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*), adalah norma kesusilaan pribadi dan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim.
- (5) Kesetaraan (*Equality Principle*), prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (6) Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Dilligence Principle*), kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim, sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi yang cermat, hati-hati, teliti, tekun dalam menjalani profesi hakim.

Keenam prinsip etika hakim tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam menyusun kode etik perilaku hakim di Indonesia. Adapun lembaga yang telah mengadopsi ketentuan tersebut di antaranya Mahkamah Konstitusi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2005 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi, juga lembaga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 11 angka 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kewenangan atributif bagi lembaga Mahkamah Agung untuk melakukan upaya pengawasan internal terhadap perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya.

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang”.

Sistem pengawasan internal di lingkungan lembaga peradilan saat ini terdiri dari dua bagian besar yaitu:⁷

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksud oleh pedoman angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut :

“Pengawasan melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal Mahkamah Agung, maka pengawasan melekat secara *mikro* dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja (Satker) dan secara *makro* dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan tingkat pertama.

⁷ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007. Halaman : 45

b. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu setiap upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang di tunjuk khusus (*exclusively assigned*) untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasi.

“Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum angka 1 huruf c, Inpres No.1 Tahun 1989).”

Kinerja dari Badan Pengawas Mahkamah Agung tersebut bisa diukur dengan kebijakan tradisi baru MA dengan dilaksanakannya penyampaian laporan tahunan MA. Merunut ke belakang pada tahun 2007 hingga maret 2008, MA menerima pengaduan sebanyak 532 (termasuk sisa pengaduan tahun 2006 sebanyak 145). Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas MA sebanyak 253 pengaduan, dan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 279 pengaduan. Selama periode 1 Januari 2007 hingga maret 2008, telah dijatuhi hukuman dan tindakan sebanyak 53 personil termasuk di antaranya 18 hakim.⁸

Data tersebut masih terlalu sedikit dibandingkan dengan temuan Komisi Yudisial pada tahun 2006, KY yang secara konstitusional mempunyai kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mendapati adanya indikasi praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) di lingkungan Mahkamah

⁸ *Ibid.* Halaman : 53

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. KY menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas sebanyak 840 laporan, termasuk di dalamnya sebanyak 8 laporan yang dicabut pelapornya dan 7 laporan berdasarkan informasi pencabutan ini menurut pelapor, salah satu alasannya diakibatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memangkas fungsi pengawasan Komisi Yudisial.⁹ Kuantitas laporan pengaduan ini meningkat pada tahun 2007, akhir desember 2007 KY menerima laporan pengaduan sebanyak 3.345 laporan yang terdiri dari 321 laporan pengaduan yang belum memenuhi syarat untuk diregister, 1936 laporan berupa tembusan, dan 1088 laporan pengaduan yang telah diregister.¹⁰

Melihat data yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung masih tergolong lemah, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Pernyataan ini bukanlah asumsi yang tidak berdasar, beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga peradilan. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FH UI) melakukan penelitian melalui kuisisioner dengan jumlah responden sebanyak 536 orang yang berasal dari kalangan praktisi hukum.¹¹ Hasilnya, sebanyak 56,97% responden memberikan pernyataan

⁹ Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2006. Halaman: 21

¹⁰ Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007. Halaman: 12

¹¹ MAPPI FH UI. *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu*. Hasil Penelitian. Tanpa Tahun

bernada negatif dan mengarah pada sifat pesimis atas proses penegakan hukum yang saat ini sedang berjalan. Faktor eksternal kemandirian aparaturnya dan lembaga peradilan menjadi tidak terpisahkan dengan penilaian masyarakat, dan apabila suatu keputusan hukum tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam suatu masyarakat berdaulat, di situ juga dipastikan bisa menimbulkan berbagai bentuk kontroversi pendapat bahwa peradilan tidak mempunyai nilai objektif dalam memutuskan persoalan yang netral.¹²

Belum lama ini, MA merilis kebijakan-kebijakan guna memperkuat fungsi kewenangan pengawasan internalnya. Keputusan-keputusan tersebut antara lain KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, serta KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Namun, selama pengawasan terhadap perilaku personil lembaga peradilan masih menjadi kewenangan internal semata, output dari pengawasan tersebut akan sulit diukur dan dipertanggungjawabkan.

Beberapa contoh kasus mengenai putusan hakim yang tidak objektif antara lain:¹³

- a. Putusan Peninjauan Kembali No.78/PK/PID/2000 dalam perkara Goro dengan terdakwa Tommy Suharto.

¹² H.F. Abraham Amos. 2007. *Katrastopi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman: 311

¹³ Wasingatu Zakiah, Aris Purnomo, Emerson Yuntho. 2004. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman: 132

- b. Putusan P.N Yogyakarta No.20/PID/ B/1996/PN.YK dalam perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Arifin Wardiyanto.
- c. Putusan P.N Jak.Sel No 156/Pid.B/2000/PN.Jaksel, Putusan M.A No.1668 K/Pid/200 dalam perkara korupsi skandal Bank Bali dengan terdakwa Djoko S. Chandra.
- d. Putusan P.N Jakarta Pusat No.449/PID.B/2002/PN.JKT.PST, Putusan P.T Jakarta Pusat No.171/PID/2002/PT.DKI JAKARTA, Putusan M.A No.572K/PID/2003 dalam perkara korupsi dana non budgeter bulog dengan terdakwa Akbar Tanjung, Dadang Ruskandar, Winfried Simatupang.
- e. Putusan P.N Jak.Pus No. 1426/Pid B/2003/P.N Jak.Pus, dalam perkara pers (pencemaran nama baik) dengan terdakwa Bambang Harymurti (pimred Tempo).
- f. Putusan P.N Jakarta Selatan No. 1488/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel, dalam perkara pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono.

Kita ambil contoh kasus *point* ‘d’ di atas, hasil eksaminasi dari majelis eksaminasi publik pada putusan perkara tindak pidana korupsi Akbar Tandjung memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara seksama, (2) Majelis Hakim tidak menelusuri secara mendalam kemana larinya dana sebesar 40 milyar, (3) di dalam persidangan, pada acara pembuktian, tidak mengejar fakta-fakta yang sangat penting terkait dengan unsur pembuktian delik tindak pidana korupsi yaitu unsur

“menyalahgunakan wewenang” dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, (4) Fakta mengenai *check* yang dikeluarkan oleh Bulog sebanyak 2 lembar senilai 20 milyar, dan 8 lembar senilai 20 milyar yang diterima oleh Akbar Tandjung, tidak diperiksa siapa yang mengambil *check* tersebut.

Upaya-upaya dalam melakukan penilaian putusan hakim sebenarnya telah ada dari lembaga peradilan itu sendiri, yakni dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1964 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Secara terminologi, kata eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “examinations” yang dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai *an investigation, search, inspection, interrogation*. Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan pengadilan dapat diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan.¹⁴ Kehadiran lembaga eksaminasi di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dengan tujuan yang berbeda-beda, eksaminasi sudah dikenal oleh institusi peradilan baik pengadilan maupun Kejaksaan dan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, lembaga eksaminasi dapat diartikan sebagai badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan/pengujian/penilaian terhadap produk peradilan, terutama pada putusan hakim. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksaminasi adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Eksaminasi

¹⁴Chandera. FX dan Endro Susilo, dkk. 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Halaman: 12

adalah bagian dari tindakan pengawasan melekat oleh Mahkamah Agung secara periodik terhadap putusan hakim (berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1964), sedangkan Komisi Yudisial sebagai lembaga *ekstra yudisial* yang kewenangannya dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan/pengujian/penilaian terhadap putusan hakim. Selain itu, dalam praktik nyata, eksaminasi sering kali dilakukan oleh masyarakat atau publik karena penegakan hukum oleh lembaga peradilan dianggap masih lemah terutama terhadap hakim yang memutus perkara secara tidak adil. Dengan demikian, terjadi pergeseran fungsi eksaminasi yang semula dilakukan secara internal dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan kemudian beralih kepada fungsi kontrol eksternal terhadap peradilan. Untuk dapat dilakukan eksaminasi pada suatu kasus, minimal harus memenuhi tiga kriteria:¹⁵

1) Kontroversial;

Kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

2) Memiliki pengaruh atau dampak sosial (*social impact*) bagi masyarakat;

¹⁵ Wasingatu Zakiyah, Aris Purnomo, Emerson Yuntho. 2004. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman: 35

Di samping kasus tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, kasus tersebut mempunyai dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional atau internasional).

3) Ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*);

Kasus yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

Mengenai eksaminasi publik, tujuan secara umumnya adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh aparat hukum termasuk di dalamnya adalah praktisi hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum yang menyimpang baik secara materiil maupun formil.¹⁶ Sementara itu, eksaminasi publik secara khusus antara lain:¹⁷

- 1) Menguji secara seksama apakah proses persidangan dalam perkara yang akan dieksaminasi sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan ilmu pengetahuan hukum;
- 2) Melakukan analisis terhadap proses persidangan perkara yang akan dieksaminasi guna melihat sampai sejauh mana pertimbangan hukum dimaksud sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik dalam tatanan hukum materiil maupun hukum formil, dan juga dengan *legal justice*, *moral justice*, serta *social justice*;

¹⁶ *Ibid.* Halaman: 31

¹⁷ *Ibid.* Halaman: 31-32

- 3) Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk turut terlibat secara lebih jauh di dalam proses analisa dan mempersoalkan proses peradilan sesuatu perkara dan putusan atas perkara yang dinilai kontroversial, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan melukai rasa keadilan masyarakat;
- 4) Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;
- 5) Mendorong para hakim dan atau penuntut umum untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, akuntabilitas, keahlian, wawasan atau perangkat peraturan hukum, perundang-undangan dan perkembangan terjadi di bidang hukum, profesionalitas, di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial.

Beberapa manfaat dari kegiatan eksaminasi yang dapat diperoleh antara lain:¹⁸

- 1) Bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum

Sebagai sebuah studi, hasil eksaminasi akan sangat bermanfaat untuk materi bagi mahasiswa fakultas hukum. Hal ini didasarkan bahwa eksaminasi merupakan suatu kegiatan ilmiah. Lebih menarik lagi apabila eksaminasi ini juga disertai dengan fakta investigasi.

¹⁸ *Ibid.* Halaman: 34-35

2) Akademisi Perguruan Tinggi

Eksaminasi dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas dan proses aktualisasi bagi para akademisi. Sehingga para akademisi tidak bergulat pada tataran akademis tetapi juga memiliki kepekaan dan daya kritis sosial yang tinggi terhadap persoalan-persoalan hukum pada tataran pragmatis.

3) Hakim, Jaksa, Pengacara

Dengan adanya eksaminasi dapat dilihat profesionalitas dari pratisi hukum (hakim, jaksa dan pengacara), penguasaan hukumnya, kemampuan filosofis dan pertimbangan hukum yang digunakannya (*etos, pagos, lagos*). Artinya (dalam perkara pidana) hakim tersebut dalam memberikan suatu putusan dan jaksa dalam membuat suatu dakwaan harus dapat mempertimbangkan semua hal baik segi hukum maupun hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan seorang terdakwa. Selain itu bagi pengacara dapat diharapkan lebih *fair* dalam membuat pembelaan bagi kliennya.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peradilan

Dari hasil eksaminasi, jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa dan atau hakim dalam perkara tersebut maka masyarakat bersama LSM dapat berperan untuk menindak lanjuti dengan melakukan investigasi terhadap hal-hal di luar proses pemeriksaan/persidangan perkara namun masih terkait dengan perkara, seperti melihat adakah indikasi suap dalam kasus tersebut. Hasil investigasi yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada institusi

penegak hukum masing-masing untuk diproses lebih lanjut (sebagai bagian advokasi).

Eksaminasi dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Panel

Suatu tim yang beranggotakan beberapa orang yang terdiri dari berbagai kalangan (akademisi, praktisi hukum, mantan hakim, mantan jaksa, maupun LSM), tim panel tersebut bertugas: *pertama* memilih produk peradilan atau putusan pengadilan yang akan dieksaminasi, *kedua* memilih orang-orang yang di tunjuk sebagai anggota majelis atau tim eksaminasi yang akan melakukan analisa atau pengujian terhadap putusan yang dieksaminasi.

2) Pembentukan Majelis Eksaminasi

Terdiri dari beberapa orang yang dipilih karena keahliannya atau integritasnya guna melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk peradilan yang telah dipilih dan ditentukan oleh tim panel.

3) Diskusi Internal/Sidang Majelis Eksaminasi

Sidang atau pertemuan yang akan oleh semua majelis eksaminasi yang telah di tunjuk, untuk membahas dan mengkaji produk peradilan ya akan dieksaminasi. Masing-masing anggota memaparkan hasil anotasi (catatan hukum) atau pemikiran terhadap produk peradilan yang di eksaminasi. Selanjutnya, dikompilasikan/disatukan hasil anotasi-anotasi tersebut oleh anggota majelis eksaminasi. Hasilnya berupa draft hasil eksaminasi yang masih perlu disempurnakan.

4) Diskusi Publik

Diskusi yang bertujuan untuk meminta masukan masyarakat (publik) terhadap hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Selain sebagai pertanggungjawaban terhadap kerja anggota majelis eksaminasi, diskusi ini juga sangat berguna untuk mewacanakan pengawasan peradilan kepada publik. Berdasarkan masukan masyarakat, draft hasil eksaminasi kemudian disempurnakan menjadi hasil eksaminasi akhir yang nantinya akan diserahkan kepada institusi hukum terkait (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung & Mahkamah Agung).

Tindak lanjut terhadap hasil eksaminasi tersebut adalah dengan mengadakan pertemuan antara pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan mengadakan kajian bersama atau dengar pendapat (*hearing*) dan penyerahan hasil eksaminasi. Hasil eksaminasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pertimbangan atau masukan kepada pimpinan lembaga untuk memberikan tindakan hukum atau hukuman atau untuk promosi atau mutasi kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan (hakim).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa putusan hakim yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mempunyai peluang untuk dilakukannya *eksternal kontrol* terhadap lembaga peradilan melalui kegiatan eksaminasi oleh Komisi Yudisial dan lembaga eksaminasi publik. Dengan demikian, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia dapat berjalan dengan baik sebagaimana diilhami spirit kredo hukum "*Fiat Justitia Pereat Mundus*". Maka, penulis

tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul: **LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA**

B. Pembatasan Masalah

Agar objek penelitian tidak menjadi bias, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Permasalahan difokuskan pada kedudukan eksaminasi dalam peradilan pidana Indonesia, eksaminasi itu sendiri dapat dilakukan oleh lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) sebagai *internal control* terhadap putusan hakim.

Selain itu, eksaminasi dapat dilakukan oleh lembaga di luar peradilan yang kewenangannya di tunjuk oleh undang-undang yakni Komisi Yudisial. Dapat pula dilakukan eksaminasi publik melalui perguruan tinggi bersama elemen masyarakat lain (NGO, praktisi hukum, mantan jaksa, mantan hakim) sebagai *eksternal control* terhadap putusan hakim. Permasalahan juga dikhususkan pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat penggunaan lembaga eksaminasi terhadap hakim. Terakhir, pembahasan mengarah pada kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi dengan disertai contoh eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.

C. Rumusan Masalah

Sebelum menginjak pada perumusan masalah, penulis akan menguraikan tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah

adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan atau rencana dengan pelaksanaan.¹⁹

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji lebih dalam lagi. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan lembaga eksaminasi dalam praktik peradilan pidana?
2. Bagaimana kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penggunaan lembaga eksaminasi pada hakim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum. Tujuan penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan kedudukan lembaga eksaminasi dalam praktek peradilan di Indonesia.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- b. Untuk mengkaji kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan lembaga eksaminasi pada hakim.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian.

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

Manfaat Teoritis:

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai eksaminasi sebagai salah satu langkah untuk mengawal proses penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah yang lebih baik.

Manfaat Pragmatis:

- a. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Memberikan rekomendasi pada Fakultas Hukum UMS agar eksaminasi dapat diaplikasikan pada mata kuliah ketrampilan keahlian atau praktek hukum, mengingat kemahiran praktek hukum (*legal practice*) sangat

dibutuhkan dalam menangani kasus konkret yang ada dalam masyarakat.

- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS.
- d. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan.²⁰ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) mensyaratkan adanya prinsip independensi yaitu terbebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Konferensi oleh *International Commission of Jurist* di Bangkok pada tahun 1965 telah merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman yang dikatakan independensi atau mandiri pada hakekatnya diikat dan dibatasi

²⁰Abdul Ghafur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman: 53

oleh rambu-rambu tertentu, dikatakan bahwa:²¹ *Independence does not mean that the judge is entitled to act in arbitrary manner.*

Batasan atau rambu-rambu dalam implementasi kebebasan itu terutama pada ketentuan hukum itu sendiri, baik segi prosedural maupun substansial. Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, keduanya, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami tentang konteks kebebasan hakim (*Independency of Judiciary*) haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (*Judicial Accountability*).²²

Lawrence Meir Friedman dalam teori *three element law system*²³ menyatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum salah satunya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga peradilan. Menurutny, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme.²⁴ Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁵

²¹ Paulus Efendi Lotulung. 2003. *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Makalah. Disampaikan Pada Seminar Pemangungan Hukum Nasional VIII. Denpasar, 14-18 Juli 2003

²² *Ibid.* Halaman: 6

²³ Lawrence Meir Friedman. 1998. *American Law: An introduction. Second Edition*. New York: W.W. Norton & Company. Page: 21

²⁴ *Ibid.* Halaman: 21

²⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 2003. Halaman: 122

Penerapan asas hukum “*res judicata pro veritate habetur*” yang menyatakan bahwa putusan hakim wajib dianggap benar meskipun bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan seharusnya tidak dimaknai sebagai alasan pembenar bagi hakim untuk tidak membuat putusan yang berkualitas.²⁶ Kualitas putusan hakim sebenarnya terletak pada penerapan hukum materiil dan hukum formil secara konsisten, selain itu pula memuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantial sebagai manifestasi keluhuran kepribadian dan martabat hakim dalam rangka menjalankan profesi penegak hukum yang mulia (*officium nobile*).

Dalam konteks Hukum Pidana, termuat cita-cita peradilan pidana “*due process of law*” yakni proses hukum yang adil dan layak, pemahaman terhadap proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan memberikan arahan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif,

²⁶ Cekli Setya Pratiwi. 2007. *Urgensi Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Hakim*. Abstrak Penelitian. Malang: PUSHAM FH UMM. Halaman: 7

pendekatan administrasi, dan pendekatan sosial.²⁷ (1) Pendekatan normatif memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pendekatan administratif memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi tersebut. (3) Pendekatan sosial memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (*basic research*), dan termasuk penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang objek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas adanya hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang lama dalam rangka menyusun teori baru.²⁸ Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dan potensi untuk dilakukannya eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.

²⁷Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta. Halaman: 7-8

²⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman: 10

2. Metode Pendekatan

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁹ Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu akan digunakan pendekatan analitis (*analitich approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan hukum.³⁰

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- 2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) UU No. 3 Tahun 2009 Jo. UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

²⁹ Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Halaman: 310

³⁰ *Ibid.* Halaman: 310

- 5) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- 6) S.E.M.A No. 1 Th. 1967 Tentang Eksaminasi.
- 7) K.M.A No:KMA/104/A/SK/XII/2006 Tentang
Pedoman Perilaku Hakim.
- 8) K.M.A No:KMA/080/SK/VII/2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan.
- 9) K.M.A
No:KMA/096/SK/2006/ Tentang Tanggung Jawab
Ketua Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan.
- 10) K.M.A
K.M.A/144/SKIVIII/2007 Tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, *paper* seminar, hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*).

5. Metode Analisis Data

Data awal yang diperoleh masih bersifat mentah, belum dapat diambil sebagai kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang objek kajian penelitian. Untuk dapat ditarik kesimpulan maka perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini melewati tiga proses, yaitu reduksi data, penyamaran data dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok bahasan. Dalam penyusunannya antara bab pertama sampai bab terakhir merupakan suatu kesatuan pembahasan yang saling terkait dan sistematis. Dalam Bab I yakni pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini.

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka mengenai tujuan hukum, penegakan hukum, independensi dan akuntabilitas peradilan, Hakim (profesi hakim dan tanggung jawab profesi) dan putusan pengadilan.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian. Dalam bab ini mendeskripsikan tentang kedudukan lembaga eksaminasi pada praktek peradilan (eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial dan masyarakat atau publik). Selain itu dibahas pula mengenai kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana (proses peradilan, isi dan sistematika putusan, penemuan hukum, argumentasi dan bahasa hukum). Setelah membahas kaidah, diuraikan pula mengenai langkah-langkah melakukan eksaminasi (memaparkan fakta atau kasus posisi, mencari persoalan hukum, penelusuran bahan hukum, analisis dan kesimpulan eksaminasi). Kemudian dilakukan kajian eksaminasi putusan perkara pidana No.1488/Pid.B/PN.Jkt.Sel, Akhir pembahasan disertai faktor pendukung dan penghambat penggunaan lembaga eksaminasi pada hakim.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.